

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Khanif, Herlambang P. Wiratman, Manunggal Kusuma Wardaya, *Hak Asasi Manusia: Dialektika vs Relativisme di Indonesia*, Cetakan Pertama, LKiS, Yogyakarta, 2017.
- Ali Marwan, *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4*, Enam Media, Medan, 2020.
- Alif Ilman Mansyur, et.al, *Pendidikan Antikorupsi: Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Antikorupsi*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Lentera Hati, Jakarta, 2006.
- Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yoga Pratama, Semarang, 2024.
- Topan Yulia Pratama, et.al, *Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2025.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zul Anwar Ajim Harahap, et.al, *Hukum Pidana Islam: Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2024.

JURNAL

Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 1, Vol. 7, 2010.

Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Judiciary*, Edisi No. 1, Vol. 14, 2025.

Arfiani, Syofirman Syofyan, dan Sucy Delyarahmi, “Problematisa Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Edisi No. 4, Vol. 6, 2023.

Chairul Huda, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 4, Vol. 18, 2011.

Dedi Iskandar, et.al, “Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia”, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2024.

Deni Setiawan, et.al, “Prinsip Proporsional dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia”, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2024.

Fenny Cahyani, et.al, “Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2021.

Harun, “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Edisi No. 1, Vol. 5, 2016.

Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Al’Adl Jurnal Hukum*, Edisi No. 3, Vol. 9, 2017.

- Ismail Marzuki, “Korupsi sebagai Kejahatan Serius: Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi”, *Policy and Law Journal (Polaw)*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2024.
- Juniar Sidiki, Nur Mohamad Kasim, dan Fitrah Amrain, “Hak Imunitas Advokat dan Prinsip Equality Before The Law: Telaah Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Obstruction of Justice”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Edisi No. 1, Vol. 5, 2025.
- Mahrus Ali, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No.1 Vol. 25, 2018.
- Markhy S. Gareda, “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001”, *Lex Crimen*, 2015, Edisi No. 1, Vol. 4, 2015.
- Moh. Anton Suryadi dan Muhammad Zainal, “Analisis Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan (Obstruction of Justice) dalam Sistem Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Edisi No. 2, Vol. 3, 2023.
- Nancy Glorya Luntungan, Muhammad Rusdi, dan Muhammad Zaki Sierrad, “Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia”, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, 2023.
- Nathanael Kenneth, “Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun”, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Edisi No.1, Vol. 2, 2024.
- Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 4, Vol. 12, 2015.
- Zico Junius Fernando, “Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana”, *Majalah Keadilan*, Edisi No. 1, Vol. 21, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

DOKUMEN HUKUM

Hasto Kristiyanto, *Permohonan Pengujian Materi Muatan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Juli 2025.

Data Elektronik

Aida Mardatillah, 20 Maret 2019, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/giliran-advokat-peradi-uji-pasal-obstruction-of-justice-lt5c9232dce1208/?page=1>, diakses tanggal 9 Januari 2026.

Andi Saputra, 12 September 2022, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6286883/halangi-penyidikan-kasus-korupsi-advokat-di-jambi-dihukum-3-tahun-bui>, diakses tanggal 10 April 2026.

M. Khusnul Khuluq, 24 Juli 2025, terdapat dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ>, diakses tanggal 4 Februari 2026.

Renata Christha Auli, 4 Maret 2024, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-221-kuhp-tentang-obstruction-of-justice-lt65e5c883364d3/>, diakses tanggal 28 April 2026.

Pusat Edukasi Antikorupsi, 9 April 2026, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20260409-memahami-jenis-korupsi-pasca-penyesuaian-kuhp-terbaru>, diakses tanggal 28 April 2026.